

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan April 2026, Kota Surakarta tercatat mengalami deflasi sebesar 0,10% (mtm) dengan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 2,27% (yoy), dan tingkat inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,90% (ytd). Tingkat inflasi Kota Surakarta lebih rendah dibanding tingkat inflasi Nasional, namun lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Jawa Tengah.
2. Pada bulan Mei 2026, Kota Surakarta tercatat mengalami **inflasi sebesar 0,31% (mtm)** dengan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 2,85% (yoy), dan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 1,21% (ytd). Tingkat inflasi Kota Surakarta lebih rendah dibanding tingkat inflasi Nasional, namun lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Jawa Tengah.
3. Pada bulan Juni 2026, Kota Surakarta mengalami **inflasi sebesar 0,32% (mtm)** dengan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 2,97% (yoy), dan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 1,54% (ytd). Tingkat inflasi Kota Surakarta lebih rendah dibanding tingkat inflasi Nasional, namun lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Jawa Tengah.

TPID Kota Surakarta terus berkomitmen untuk menjaga distribusi pasokan dan stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat dan diharapkan dapat menjaga capaian inflasi yang rendah dan stabil sesuai target sasaran inflasi Nasional.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan April 2026, deflasi utamanya didorong oleh sbb:

Deflasi pada bulan April 2026 utamanya didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil -0,27% serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil -0,10%. Komoditas yang memberikan andil deflasi antarlain daging ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, telur ayam ras, dan tarif angkutan antar kota.

- a. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar -1,14 persen (mtm). Deflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, bayam, kangkung, dan jeruk. Penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras didorong oleh peningkatan produksi yang mengakibatkan pasokan di pasar melimpah. Di sisi lain, permintaan masyarakat juga mengalami penurunan pasca HBKN Idul Fitri pada bulan Maret sehingga turut memberikan tekanan terhadap penurunan harga kedua komoditas tersebut.
- b. Kelompok Perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat mengalami deflasi sebesar 1,34 persen (mtm). Deflasi pada kelompok ini utamanya dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan. Penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan melemahnya harga emas di pasar internasional mencapai 3,3 persen.

2. Pada bulan Mei 2026, inflasi utamanya didorong sbb:

Inflasi pada bulan Mei 2026 utamanya didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,12 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan dengan andil 0,10 persen, serta Kelompok Transportasi dengan andil 0,06 persen. Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi adalah cabai merah, telepon seluler, cabai rawit, bawang merah, beras, dan laptop/notebook.

- a. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 0,53 persen (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh peningkatan harga pada komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras. Kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah disebabkan oleh penurunan tingkat produksi di berbagai wilayah karena belum memasuki masa panen. Selain itu, adanya peningkatan permintaan selama periode HBKN Idul Adha memberikan tekanan lebih terhadap inflasi komoditas tersebut.
- b. Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami inflasi sebesar 1,41 persen (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh peningkatan harga pada komoditas telepon seluler, dan laptop/notebook. Kenaikan harga elektronik ini didorong oleh lonjakan biaya produksi dan kelangkaan komponen memori (RAM/storage) akibat tingginya permintaan industri kecerdasan buatan (AI). Selain itu, pelemahan rupiah terhadap dollar yang terjadi pada bulan Mei sebesar 2,20%
- c. Kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 0,49 persen (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh peningkatan tarif angkutan udara, bensin, dan pelumas/oli mesin. Kenaikan tarif angkutan udara disebabkan oleh kebijakan Kementerian Perhubungan untuk maskapai mengenakan biaya tambahan (fuel surcharge) sebagai dampak lonjakan harga avtur domestik pada awal Mei 2026. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada komoditas bensin didorong oleh penyesuaian harga BBM Non-Subsidi jenis Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

3. Pada bulan Juni 2026, inflasi utamanya didorong oleh sbb:

Inflasi pada bulan Maret 2026 utamanya didorong oleh kenaikan pada Kelompok Makanan Transportasi dengan andil 0,26 persen serta Kelompok Informasi Komunikasi dan Jawa Keuangan.

- a. Kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 2,08 persen (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, dan pelumas/oli mesin. Andil bensin terhadap inflasi kelompok ini cukup tinggi mencapai 0,22 persen, hal ini didorong oleh kebijakan penyesuaian harga BBM Non Subsidi sebanyak 2 kali, yaitu pada 1 Juni 2026 untuk Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta tanggal 10 Juni 2026 untuk jenis Pertamina dan Pertamina Green. Kenaikan BBM Non Subsidi jenis Pertamina sebesar 32,1% ini berdampak pada kenaikan konsumsi BBM Subsidi Peralite.
- b. Kelompok Informasi Komunikasi dan Jawa Keuangan mengalami inflasi sebesar 0,51 persen (mtm). Inflasi pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga telepon seluler, dan laptop/notebook. Kenaikan harga elektronik ini didorong oleh lonjakan biaya produksi dan kelangkaan komponen memori (RAM/storage) akibat tingginya permintaan

industri kecerdasan buatan (AI). Selain itu, pelemahan rupiah terhadap dollar yang terjadi pada bulan Mei sebesar 2,20%

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti **Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi** bersama Kementerian Dalam Negeri secara rutin setiap minggu melalui daring. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta.
2. Melakukan **Pemantauan dan Pembaruan Data Harga Komoditas** di Pasar Legi, Pasar Gede, dan Pasar Nusukan melalui aplikasi SiHati dan SP2KP. Ketiga pasar tersebut merupakan pasar pantauan BPS yang menjadi acuan dalam perhitungan tingkat inflasi. Pemantauan harga dilaksanakan secara harian guna memastikan data yang actual dan akurat, sehingga memungkinkan langkah intervensi yang cepat dan tepat terhadap lonjakan harga yang signifikan pada komoditas tertentu.
3. Melaksanakan **Forum Komunikasi Distributor** guna mendorong penguatan komunikasi dengan distributor dalam rangka pengendalian harga dan menjaga ketersediaan komoditas. Komunikasi ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait kondisi pasokan dan perkembangan harga di tingkat distributor sekaligus sebagai media untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses distribusi. Dengan adanya identifikasi atas kondisi tersebut, TPID Kota Surakarta dapat merumuskan Langkah intervensi yang tepat untuk memastikan kelancaran distribusi bapokting sehingga stabilitas harga tetap terjaga.
4. Melaksanakan kegiatan **Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Murah** sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta meningkatkan keterjangkauan masyarakat. GPM dilaksanakan sebanyak 2 kali di Kecamatan Laweyan dan Kelurahan Mojo oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Surakarta bekerja sama dengan BULOG, Perumda PAU Pedaringan, ID Food, Poklahsar, dan Kelompok Tani. Selain itu, Pasar Murah dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam rangka menghadapi HBKN Idul Adha.
5. Melaksanakan **Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Penting, BBM, serta LPG** subsidi 3 kg pada tingkat agen dan distributor secara berkala untuk memastikan ketersediaan pasokan, memantau perkembangan harga di lapangan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
6. Melaksanakan **Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok** di Pasar Tradisional sebagai upaya memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, terutama menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
7. Mendorong **gerakan menanam** dengan urban farming dan office farming sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan terbatas di wilayah perkotaan. Terdapat 97 kelompok tani dan kelompok wanita tani di bawah binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Dukungan terhadap kelompok tani diberikan dengan bentuk penyuluhan, bantuan bibit, dan media tanam.
8. Melaksanakan **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka memperkuat sinergi dengan daerah sekitar dan menjaga ketersediaan pasokan. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tentang Penyediaan Bahan Pangan dalam Mendukung Upaya Pengendalian Inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Selama Triwulan II, kelompok Transportasi memberikan andil inflasi tertinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi, sejalan dengan meningkatnya harga minyak dunia. Kenaikan pada komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan biaya transportasi dan berpotensi mendorong perdeseran permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Peningkatan tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Surakarta pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Perlu untuk melaksanakan koordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas guna membahas kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax serta menilai dampak yang ditimbulkan. Penting untuk membahas terkait pengelolaan kuota fakultatif BBM subsidi di Kota Surakarta serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.